



# REKOMENDASI RAKERNAS XVII APEKSI 2024

## KOTA SEJAHTERA, INDONESIA MAJU

1-6 Juni 2024



### Pesan Kunci

- Mendorong realisasi deregulasi dan debirokratisasi yang sejalan dengan otonomi daerah dan amanah desentralisasi
- Mendorong akses satu data termasuk data kependudukan dan kemiskinan untuk akselerasi kebijakan peningkatan kesejahteraan
- Mendorong konsistensi pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan secara harmonis dan berkelanjutan dimasa transisi pemerintahan
- Memfasilitasi koordinasi antar kementerian dalam sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan dokumen RPJPN 2025 - 2045 dengan RPJPD

### Isu Strategis dan Narasi Rekomendasi

#### REGULASI

- Mendorong transparansi dan kemudahan akses data terkait penanganan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting
- Mendorong kelengkapan aturan pelaksana UU HKPD dan UU ASN
- Mendorong kejelasan kewenangan Provinsi di Ibu Kota Nusantara
- Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan teknis yang mendorong sinkronisasi visi-misi calon kepala daerah dengan RPJPD
- Mendorong pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk melakukan transformasi ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan kemandirian fiskal daerah

#### KELEMBAGAAN

- Mendesak dilakukan penguatan dan pendampingan oleh pemerintah untuk pemerintah daerah di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terkait pengembangan Superhub Ekonomi Nusantara dan stabilitas pertahanan dan keamanan
- Meninjau ulang kebijakan rencana pemisahan inspektorat pemerintah daerah dari struktur organisasi pemerintahan daerah
- Mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kementerian/lembaga yang mengalami tumpang-tindih fungsi, tugas dan kewenangan (penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, penanganan stunting, penyusunan peraturan daerah, standard dan kriteria jabatan fungsional)

#### FISKAL

- Meninjau ulang biaya perjalanan yang realistis sebagai dampak implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional
- Meninjau ulang *mandatory spending* dan tambahan alokasi dana transfer daerah sebagai dampak pergeseran tata kelola keuangan dan manajemen Aparatur Sipil Negara
- Menetapkan standar alokasi dana kelurahan untuk mendukung percepatan dan mengantisipasi ketimpangan pembangunan di daerah

### Rekomendasi Bersurat dan Audiensi Kepada Menteri dan Kepala Lembaga

#### Kementerian Dalam Negeri (17 Rekomendasi)

##### Mendesak:

- Memfasilitasi Sinkronisasi dan harmonisasi RPJPN 2025 - 2045 dengan RPJPD
- Memfasilitasi penguatan dan Peran Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara
- Memfasilitasi Sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk penghitungan opsen PKB dan BBNKB
- Ketetapan Pedoman faktor penyesuaian sewa barang milik daerah
- Memfasilitasi Penguatan kapasitas ASN jelang PILKADA serentak

#### Kementerian Keuangan (8 Rekomendasi)

##### Mendesak:

- Memfasilitasi Perubahan *mandatory spending* dan tambahan alokasi dana transfer daerah sebagai dampak pergeseran tata kelola keuangan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (termasuk pengadaan PPPK)
- Memfasilitasi Sinkronisasi penghitungan bagi hasil opsen pajak untuk kendaraan bermotor dan BBNKB antara provinsi dengan kabupaten/kota
- Ketetapan Perubahan biaya perjalanan dinas dampak dari Perpres No. 53 Tahun 2023
- Ketetapan Pembagian PPH kepada daerah berdasarkan PMK No. 112 Tahun 2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

#### Kementerian PAN dan RB (10 Rekomendasi)

##### Mendesak:

- Ketetapan Evaluasi pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, penataan ulang jabatan fungsional dan struktural
- Ketetapan Reformulasi sistem penilaian kinerja
- Mengkaji ulang kebijakan pemisahan inspektorat daerah dalam struktur organisasi pemerintah daerah
- Ketetapan Sinkronisasi digitalisasi pelayanan publik

#### Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (6 Rekomendasi)

##### Mendesak:

- Ketetapan *tiping fee* dalam pengembangan waste to energy serta karbon kredit
- Merealisasikan perubahan iklim dan dampaknya masuk ke dalam perencanaan Pembangunan
- Merealisasikan Kolaborasi pengelolaan persampahan menuju *green environment* antara pemerintah daerah dengan swasta
- Ketetapan perdagangan karbon kredit dan pengembangan informasi kualitas lingkungan

#### Bappenas (5 Rekomendasi)

##### Mendesak:

- Merealisasikan Penguatan dan revitalisasi pembangunan wilayah Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi Nusantara dan industrialisasi yang berbasis SDA dan pelestarian alam
- Merealisasikan pengembangan, pengelolaan dan penataan kawasan perkotaan diarahkan untuk pengembangan kerjasama keterkaitan antar wilayah dan potensi daerah (aglomerasi)
- Memfasilitasi Pendampingan sinkronisasi RPJPN 2025 - 2045 dengan RPJPD

### Aspirasi 98 Anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

#### KOMWIL I

- 16 POIN REKOMENDASI UNTUK 16 KEMENTERIAN
- Isu Nasional: Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat (pengendalian inflasi, kenaikan harga bahan pokok dan transportasi); Ketetapan penyederhanaan proses kerjasama KPBU dan keringanan bunga khusus; Mendorong kebijakan yang tegas tentang *tiping fee* dalam pengembangan waste to energy serta karbon kredit

#### KOMWIL II

- 10 POIN REKOMENDASI UNTUK 7 KEMENTERIAN
- Isu Nasional: Mendorong konektivitas jaringan jalan antar kota di Sumatera Bagian Selatan; Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi; Memfasilitasi percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong kualitas pelayanan publik dan percepatan investasi di daerah; Menambah DAU untuk anggaran P3K

#### KOMWIL III

- 26 POIN REKOMENDASI UNTUK 14 KEMENTERIAN
- Isu Nasional: Mendorong pengggajian PPPK menggunakan DAU seluruhnya sehingga APBD dapat efektif dan efisien; Mendorong penambahan anggaran stunting; Mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang jabatan struktural dan fungsional; Mendorong pengembangan kewenangan untuk menangani wilayah sungai dan danau sebagai antisipasi bonus demografi

#### KOMWIL IV

- 13 POIN REKOMENDASI UNTUK 9 KEMENTERIAN
- Isu Nasional: Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan keterbukaan perencanaan tata ruang dan penegakan hukum bagi pelanggaran perencanaan tata ruang; Mendorong pemerintah merealisasikan sarana dan prasarana pada fasilitas umum bagi penyandang disabilitas; Mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan *mandatory spending* bagi daerah yang sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat; Mencalonkan sebagai tuan rumah MUNAS tahun 2025

#### KOMWIL V

- 19 POIN REKOMENDASI UNTUK 6 KEMENTERIAN
- Isu Nasional: Merealisasikan pengembangan wilayah Kalimantan dalam jangka panjang sebagai Superhub Ekonomi Nusantara; Mendorong pemerintah menjamin hak putra/putri daerah Kalimantan untuk turut serta dalam penerimaan ASN minimal 30%; Mendorong pemerintah untuk akselerasi pembangunan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan IKN dengan pertimbangan risiko bencana terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan; Mendorong percepatan transportasi udara

#### KOMWIL VI

- 5 POIN REKOMENDASI UNTUK PRESIDEN & 4 KEMENTERIAN
- Isu Nasional: Mendesak untuk mengubah Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional; Merealisasikan keberlanjutan adanya dana Kelurahan untuk mendukung peningkatan pengelolaan dan pembangunan di tingkat kelurahan, serta mengantisipasi terjadinya ketimpangan kemajuan antara desa dan kelurahan; Mendesak pemerintah menggunakan data-data kependudukan penerima sebagai bantuan yang diupdate oleh Pemerintah daerah

# KOMPONEN & PROGRAM APEKSI

## Mandatory Munaslub 2023

### ADVOKASI KEBIJAKAN

1. Asesmen & Riset
2. Pemerintahan Masa Transisi
3. Kolaborasi Pentahelix
4. Pengembangan & Produksi

### PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Asesmen & Riset
2. Ketahanan Iklim
3. Ekonomi Hijau
4. Pengembangan & Produksi

### PENINGKATAN KAPASITAS & INOVASI

1. Asesmen & Riset
2. APEKSI Academy
3. Knowledge Management
4. Menuju Kota Inklusif
5. Kota Kita Ramah Keluarga
6. Pengembangan & Produksi

### KELEMBAGAAN & KEMITRAAN

1. Asesmen & Riset
2. Konsolidasi Organisasi
3. Pengembangan Kemitraan
4. Co Branding APEKSInergi
5. Pengembangan & Produksi

### STAKEHOLDER RELATIONS

1. Asesmen & Riset
2. Youth City Changers & Stakeholder Upgrading
3. Youth Creative Stakeholders
4. APEKSI Internship & Squad

### STRATEGIC COMMUNICATIONS

1. Asesmen & Riset
2. Dukungan Komunikasi Program Lintas Komponen
3. Literasi Digital & Penguatan Kapasitas
4. Pengembangan & Produksi

### ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Peningkatan Pendapatan
2. Efisiensi Pengeluaran & Belanja
3. Tata Kelola Administrasi & Kantor

### LINTAS KOMPONEN

1. Asesmen & Pemetaan Stakeholders Relations
2. Penguatan Pilar Karakter Bangsa di tingkat kota
3. Mitigasi Konflik berbasis HAM di tingkat kota
4. Inovasi dan Akselerasi Pokja-Pokja APEKSI

### Kolaborasi #APEKSInergi

- Kunjungan Luar Negeri
- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Seminar

- Publikasi Media
- Join Program, Co-Branding dan Project Collaboration

# PROGRAM 2025

## ADVOKASI KEBIJAKAN

1. **Asesmen & Riset**
  - Pendataan: permasalahan, status/capaian & praktik baik kota
  - Analisis data
2. **Penguatan Kepala Daerah Baru**
  - Kemandirian fiskal:
    - Opsen PKB & BBN-KB
    - Alternatif pembiayaan pembangunan
  - Penguatan kapasitas Kepala daerah untuk pencegahan korupsi
3. **Kolaborasi Pentahelix**
  - Penguatan tata Kelola pelayanan publik
    - Dialog kebijakan evaluasi pelaksanaan SPBE
    - Evaluasi pelaksanaan jaringan elektronik & komunikasi
  - Dialog kebijakan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan daerah

## PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. **Asesmen & Riset**
  - Pendataan: permasalahan, status/capaian & praktik baik kota
  - Analisis data
2. **Ketahanan Iklim & Bencana**
  - Knowledge Management Forum (KMF)
  - Workshop Infrastruktur Hijau
3. **Ekonomi Hijau**
  - Workshop Sirkular Ekonomi
  - Pelatihan pendanaan alternatif

## PENINGKATAN KAPASITAS & INOVASI

1. **Asesmen & Riset**
  - Pendataan: permasalahan, status/capaian & praktik baik kota
  - Analisis data
2. **APEKSI Academy**
  - Pelatihan Pemanfaatan AI untuk Tata Kelola Pemerintahan
  - Bimbingan Teknis Jurnalistik
3. **Knowledge Management**
  - Pendokumentasian Best Practice Kota
  - Sharing praktik baik dan launching buku
4. **Menuju Kota Inklusif**
  - Penguatan infrastruktur inklusif
  - Pertemuan Nasional Kota Inklusif
5. **Kota Kita Ramah Keluarga**
  - Workshop nasional
  - Pendampingan kota ramah keluarga

# PROGRAM 2025

## KELEMBAGAAN & KEMITRAAN

1. **Asesmen & Riset**
  - Pendataan: permasalahan, status/capaian & praktik baik kota
  - Analisis data
2. **Konsolidasi Organisasi**
  - Rapat Dewan Pengurus
  - Rapat Koordinasi Sekretariat Komwil
  - HUT APEKSI
  - Musyawarah Nasional VII
  - Rapat Kerja Teknis
  - APEKSI Outlook
  - Rakerwil/Rakorwil/Muskomwil
3. **Pengembangan Kemitraan**
  - HUT APEKSI Expo
  - Indonesia City Expo (ICE) Munas 2025
  - Indo Smart City Forum & Expo 2025
  - Expo Clean & Laundry 2025
4. **Co Branding APEKSInergi**
  - Nasional: City Leader Community (Kompas)

## STAKEHOLDER RELATIONS

1. **Asesmen & Riset**
  - Pendataan: permasalahan, status/capaian & praktik baik kota
  - Analisis data
2. **Youth City Changers & Stakeholders Upgrading**
  - Program YCC Nasional & Regional
  - YCC Relation (Media komunikasi komunitas pemuda)
3. **Youth Creative Stakeholders**
  - Olahraga & Hidup Sehat
  - Local Pride
  - Pemimpin Kota Masa Depan
4. **APEKSI Internship & Squad**
  - Rubrik Magang APEKSI (Rumpi)

## ADMINISTRASI & KEUANGAN

1. **Tata Kelola Administrasi & Kantor**
  - Perencanaan Anggaran & Belanja, Program Kerja Komponen
  - Laporan Realisasi Anggaran & Pengeluaran, Program Kerja
2. **Peningkatan Pendapatan**
  - Iuran Anggota
  - Non Iuran: Pelatihan berbayar, kerjasama Lembaga pemerintahan & swasta, dalam dan luar negeri serta peluang donor
3. **Efisiensi Pengeluaran & Belanja**
  - Pengeluaran Belanja Administrasi Umum & Personalia & Belanja Komponen harus sesuai dengan anggaran yang telah disusun & disetujui oleh Dewan Pengurus

## STRATEGIC COMMUNICATIONS

1. **Asesmen & Riset**
  - Pendataan: permasalahan, status/capaian & praktik baik kota
  - Analisis data
2. **Dukungan Komunikasi Program Lintas Komponen**
3. **Literasi Digital & Penguatan Kapasitas**
  - Workshop Smart City terkait PP 59/2022 tentang Perkotaan
  - Workshop Pemanfaat Kecerdasan Buatan (AI) dalam Tata Kelola Perkotaan
  - Bimbingan Teknis ISO & SNI Smart City
  - Event Nasional:
    - Indonesia International Smart City Expo & Forum 2025 di Jakarta
  - Event Internasional:
    - Smart City Expo World Congress 2025 di Barcelona, Spanyol
    - Smart Nation 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia